



UNIVERSITAS
INDONESIA
Veritas, Probitas, Justitia

FAKULTAS
ILMU SOSIAL
DAN ILMU
POLITIK

Diplomasi Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Optimalisasi *Multilevel* dan *Multitrack Diplomacy*

Fredy Buhama Lumban Tobing

Pidato pada Acara Pengukuhan sebagai
Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Depok, 6 Agustus 2022



UNIVERSITAS
INDONESIA
Veritas, Probitas, Iustitia

FAKULTAS
ILMU SOSIAL
DAN ILMU
POLITIK

Diplomasi Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Optimalisasi *Multilevel* dan *Multitrack Diplomacy*

Fredy Buhama Lumban Tobing

Pidato pada Acara Pengukuhan sebagai
Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Depok, 6 Agustus 2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Yang terhormat,

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia,
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia,
3. Rektor, Para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas Indonesia,
4. Ketua, Sekretaris, dan para anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia,
5. Ketua, Sekretaris, dan para anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia,
6. Ketua, Sekretaris, dan para anggota Senat Akademik Universitas Indonesia,
7. Dekan, Para Wakil Dekan, dan Sekretaris Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia,
8. Ketua, Sekretaris, para anggota Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia,
9. Ketua, Sekretaris, dan para anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia,
10. Dekan dan Para Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Indonesia,
11. Direktur Sekolah dan Program Vokasi di lingkungan Universitas Indonesia,
12. Para Manajer, Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, sejawat Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia,
13. Para tamu undangan, keluarga, dan hadirin sekalian.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih atas berkat dan karuniaNya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal'afiat menghadiri Upacara Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia dalam Sidang Terbuka Universitas Indonesia pada hari ini.

Hadirin yang saya muliakan,

Kini perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai **Guru Besar di bidang Ilmu Hubungan Internasional**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan judul:

**“Diplomasi Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia:
Optimalisasi *Multilevel* dan *Multitrack Diplomacy*”**

Politik luar negeri pada hakekatnya merupakan suatu kebijakan nasional pemerintah yang dirumuskan sebagai instrumen dalam membangun hubungannya dengan negara-negara maupun organisasi-organisasi internasional lain untuk mencapai tujuan nasional. Dengan demikian kebijakan luar negeri merupakan tindakan konkrit yang diambil suatu pemerintahan yang menyangkut isu-isu tertentu sebagai usaha dan aktivitas negara dalam membangun citra dan hubungan luar negerinya. Dalam hal ini aktor-aktor dalam pembuatan kebijakan luar negeri ini dikenal sebagai *the governmental agencies* seperti badan eksekutif dan legislatif dan *the non governmental agencies* seperti partai politik, kelompok kepentingan, media komunikasi, dan opini publik (Macridis, 1979: 6-17).

Di negara mana pun kebijakan luar negeri sangat ditentukan oleh karakter dan dinamika politik di dalam negeri (*domestic politics*). Pada saat yang sama kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh adanya usaha-usaha untuk mengamankan sumber-sumber daya dukungan eksternal demi pembangunan nasional tanpa mengorbankan kemerdekaannya (Kahin, dalam Weinstein, 1976: 9-12). Oleh karena itu, politik luar negeri dan domestik tidak dapat dipisahkan karena terdapat “saling mencakup secara simbiotik” (Michael Leifer, 1986). Politik luar negeri merupakan refleksi dari politik domestik. Dengan demikian,

politik luar negeri merupakan hasil perpaduan dan cerminan politik domestik dan politik, baik regional maupun internasional/ global.

Konsep dasar dalam kita memahami suatu kebijakan luar negeri adalah **kepentingan nasional** (Nathan, 1995:199). Indonesia dari waktu ke waktu dalam penyelenggaraan kebijakan luar negerinya selalu dihadapkan pada bagaimana menjaga titik keseimbangan antara dinamika politik domestik dan dukungan internasional tanpa harus mengorbankan prinsip kemandirian atau kemerdekaannya sebagai bangsa dan negara berdaulat (Lumbantobing, 2011). Hal ini sejalan dengan pandangan James N. Rosenau (1980:373-400) bahwa kebijakan luar negeri diwarnai oleh faktor politik domestik dan internasional yang tidak ubahnya seperti dua sisi mata uang.

Secara lebih spesifik Christopher Hill (2003: 51-71) menjelaskan pentingnya peran dan tanggungjawab kepala pemerintahan dan menteri luar negeri dalam kita memahami suatu kebijakan luar negeri. Di samping itu, tipe dan situasi pemerintahan juga penting diperhatikan. Makin otoriter suatu pemerintahan, maka kebijakan luar negerinya akan makin terpusat di tangan pemimpin dan orang-orang terdekatnya termasuk menteri luar negerinya. Sedangkan di negara yang lebih demokratis, kebijakan luar negerinya akan lebih terbuka dan melibatkan partisipasi banyak pihak seperti parlemen, partai politik, media massa, opini publik, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan partai oposisi (Rourke, 2005).

Oleh karenanya selain faktor politik domestik dan internasional, penting pula dipahami bagaimana faktor *power figure* dalam kebijakan luar negeri suatu negara, terutama faktor personalitas kepala pemerintahan, yaitu figur presiden selaku pemegang supremasi kekuatan di Indonesia. Faktor individual presiden ini kemudian dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda misalnya oleh John P. Lovell (1970) disebut sebagai personalitas, James. N. Rosenau (1980) *idiosyncratic*,

Leo Suryadinata (1996) faktor personal presiden, dan Christopher Hill (2003) dengan sebutan *individual personality*.

Hadirin yang saya muliakan,

Dalam perkembangannya, kemudian hadir isu-isu “intermestik” (internasionalisasi masalah-masalah domestik) di mana kepentingan nasional yang melekat kepada entitas negara menjadi semakin terbuka untuk dijadikan isu internasional/ global, seperti pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan hidup, demokratisasi dan lain-lain. Oleh karenanya untuk mencapai kepentingan nasional, setiap negara akan menggunakan kebijakan luar negeri sebagai instrumennya mengingat bahwa kebijakan luar negeri merupakan kebijakan negara berdaulat dalam berinteraksi dengan negara lain yang diwarnai oleh faktor-faktor *domestic politics* dan *international politics*. Adapun instrumen dari kebijakan luar negeri adalah diplomasi yang berfungsi melakukan lobby dan negosiasi guna mencapai tujuan dan sasaran nasional tertentu (Beach, 2019) yang sehari-hari dilaksanakan oleh para diplomat di bawah Kementerian Luar Negeri.

Sejak awal pasca kemerdekaan 1945-1966 perjuangan dan diplomasi Indonesia sudah menghadapi berbagai tantangannya. Keberhasilan politik luar negeri Indonesia dengan perangkat kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menerapkannya dalam forum-forum pergaulan internasional sangat ditentukan oleh kemampuan dan keunggulan diplomasi Indonesia yang dalam banyak hal dilaksanakan oleh kementerian luar negeri. Namun di era globalisasi saat ini diplomasi tidak lagi hanya ditumpukan di pundak Kementerian Luar Negeri tetapi sudah meluas ke kementerian lainnya mengingat makin kompleksnya dinamika masalah-masalah internasional yang muncul di berbagai

negara tertentu yang secara cepat membawa dampak kepada negara-negara lain.

Salah satu ciri khas yang melekat kuat dalam penyelenggaraan politik luar negeri Indonesia adalah adanya prinsip bebas aktif yang untuk pertama kalinya dinyatakan oleh Bung Hatta pada tahun 1948 ketika beliau menanggapi situasi politik domestik yang berkembang ketika itu pasca kemerdekaan. Ternyata prinsip bebas aktif tersebut terus diterapkan dalam politik luar negeri Indonesia dan bahkan telah mendapatkan pembenaran dalam konteks internasional sejak Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung (Alatas, 1991 dalam Djumala, 2021; Acharya, 2008).

Kemunculan globalisasi sejak 1990an telah memunculkan kajian diplomasi ekonomi yang harus mendalami kebijakan-kebijakan ekonomi domestik agar mampu memahami reaksi ekonomi politik internasionalnya (Chatterjee, 2020). Fitur diplomasi ekonomi adalah sensitivitasnya terhadap dinamika perkembangan pasar --yang sangat berbeda dengan diplomasi politik dan analisis kebijakan luar negeri seperti yang telah diutarakan sebelumnya. Meningkatnya integrasi ekonomi telah menciptakan pasar-pasar global produksi dan investasi yang baru. Regulasi kebijakan-kebijakan nasional dapat mengubah daya saing lokasi-lokasi yang berbeda sehingga pasar dapat menekan kebijakan-kebijakan nasional yang tidak sejalan dengan ekspektasi. Perkembangan pasar juga dapat membentuk aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, mempengaruhi posisi-posisi negosiasi dan berbagai kemungkinan alternatif penawaran guna menghasilkan suatu solusi yang dapat dinegosiasikan. Dengan demikian pasar merupakan unsur endogen diplomasi ekonomi yang merupakan bagian integral dari proses diplomasi ekonomi tersebut dan selalu memberikan berbagai solusi yang efisien khususnya dalam sistem finansial yang hancur. Oleh karenanya menjadi makin penting saat ini untuk mengkaji dan

memahami bagaimana diplomasi ekonomi dilaksanakan oleh negara di tengah deru gelombang globalisasi yang begitu dinamis. Secara khusus menarik untuk mempelajari bagaimana kiprah Indonesia sebagai *the middle income power* melaksanakan diplomasi ekonominya dalam upaya mencari pasar produksi dan investasi yang baru. Hal ini menjadi sangat penting dan mendesak dilakukan guna meningkatkan kinerja ekonomi Indonesia yang lebih tinggi lagi tanpa harus meninggalkan mitra dagang tradisionalnya yang selama ini sudah baik seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Jepang.

Sejak berakhirnya masa Perang Dingin di awal 1990an, dinamika hubungan antar negara di tingkat regional maupun global terus mengalami perubahan signifikan. Kemunculan AS sebagai kekuatan utama terbesar dunia serta-merta telah menjadikan AS sebagai aktor dominan dalam hubungan ekonomi dan politik global. Pada saat yang bersamaan, peran institusi internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), dan lembaga perdagangan internasional seperti World Trade Organization (WTO) juga menguat dengan mengusung paham liberalisme.

Namun dalam perkembangan selanjutnya ketika terjadi Krisis Asia tahun 1997 kepercayaan publik dunia terhadap keberadaan institusi internasional mulai goyah akibat ketidak-mampuannya menyelesaikan krisis di banyak negara. Di saat yang bersamaan gugatan terhadap WTO sebagai institusi perdagangan internasional juga mulai marak bermunculan. WTO terutama dituding tidak memberikan perlakuan yang fair terhadap negara-negara berkembang.

Dalam perjalanannya, WTO sebagai lembaga multilateral tidak lagi menjadi pilihan utama kerja sama perdagangan yang dapat diandalkan oleh negara-negara berkembang. Pilihan kerja sama yang dilakukan adalah melalui Free Trade Agreement (FTA), baik di tingkat bilateral maupun regional di bawah payung regionalisme ekonomi, misalnya

European Economic Community (EEC) yang kemudian menyepakati terbentuknya pasar tunggal Eropa, NAFTA yang dibentuk oleh AS bersama dengan Mexico dan Kanada. Di kawasan Asia Pasifik pun muncul Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sementara itu di kawasan Amerika Latin hadir kerja sama MERCOSUR dan Aliansi PASifik (*Pacific Alliance*) yang banyak menarik perhatian negara-negara berkembang untuk menjadi anggotanya termasuk Indonesia.

FTA diyakini mampu akan membawa dampak pada meningkatnya kesejahteraan negara-negara yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Perdagangan bebas (*free trade*) juga diklaim memberikan banyak keuntungan seperti terjadinya pertukaran barang, spesialisasi negara, tersedianya keragaman produk hingga transfer teknologi. Indonesia hingga tahun 2021 telah memiliki 22 FTA, meningkat dibandingkan tahun 2017 dengan 18 belas FTA, enam di tingkat regional (AFTA, AANZ, ASEAN-China, ASEAN-India, ASEAN-Jepang, dan ASEAN-Korea,), dan 16 kerja sama bilateral antara lain Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA), Indonesia - Pakistan FTA, Indonesia - European Union, Indonesia - Australia, Indonesia - Chile, dan Indonesia - Iran, Indonesia-Korea (FTA Center, 2021; Merdeka, 2021).

Selain itu, pada saat yang sama terjadi beberapa perubahan konstelasi dalam hubungan internasional. Wacana pergeseran *from West to Rest* (Fareed Zakaria, 2009) hadir, seiring tren pertumbuhan ekonomi yang terpusat di kawasan Asia Pasifik yang merupakan kawasan yang dominan dihuni oleh negara-negara berkembang. Bahkan arus investasi asing terus meningkat terutama di kawasan Asia dan Amerika Latin. Tak hanya itu, krisis yang melanda negara-negara utama seperti krisis di Amerika dan Eropa mengindikasikan pentingnya mencari mitra baru atau mitra non tradisional. Kemunculan negara-negara *emerging economies* seperti China, Indonesia, Meksiko, Chile,

menunjukkan penguatan posisi dan potensi ekspansi yang dapat dilakukan oleh negara-negara tersebut. Apalagi menjamurnya berbagai kerja sama regional dan jumlah FTA yang terus meningkat, menunjukkan hubungan interdependensi yang terbangun semakin dalam.

Hadirin yang saya muliakan,

Menanggapi dinamika perubahan internasional di atas, Indonesia dipandang perlu untuk memetakan mitra non tradisional yang potensial, antara lain di kawasan Afrika dan Amerika Latin. Sesungguhnya dalam era globalisasi dewasa ini, faktor jarak geografis tidak lagi menjadi alasan utama untuk melihat hubungan ekonomi antar negara. Menguatnya interdependensi antar negara, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang cepat dan pesat mestinya justru dapat mendorong peningkatan hubungan ekonomi antar negara. Menyadari hal tersebut, nampaknya diplomasi ekonomi yang solid menjadi satu *tool* yang perlu dioptimalkan dalam memperluas kerja sama ekonomi tersebut.

Diplomasi berdasarkan tingkatannya secara umum terdiri atas diplomasi bilateral dan multilateral. Diplomasi bilateral merupakan salah satu bentuk diplomasi dengan beberapa karakteristik yang perlu dipahami. Pertama, bahwa hubungan yang dibangun berada pada tingkatan tradisional dengan orientasi *inward looking*. Kedua, bentuk diplomasi yang dilakukan bersifat sederhana dan tidak membutuhkan mekanisme ataupun keterlibatan organisasi. Dalam hal ini bentuk diplomasi tradisional (sederhana) yang menjadikan diplomasi bilateral relatif mudah untuk diterapkan di tingkat domestik. Namun dalam hubungan antara negara kuat dan lemah, diplomasi bilateral ini cenderung menyulitkan negara lemah karena negara yang lebih kuat

cenderung untuk memaksakan kepentingannya. Jadi diplomasi bilateral cenderung bersifat konfrontatif karena masing-masing pihak ingin memperoleh posisi yang lebih menguntungkan. Oleh karenanya kemudian berkembang diplomasi multilateral yang merupakan bentuk diplomasi modern (Barston, 1988), karena melibatkan banyak pihak atau negara sehingga sangat sulit bagi salah satu pihak untuk memaksakan keinginannya ataupun mendominasi pihak lain. Diplomasi multilateral ini lazimnya berlangsung dalam wadah institusi internasional dan banyak dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang untuk menegosiasikan kepentingannya (Bayne & Woolcock, 2007).

Dalam kaitan dengan Indonesia, dipandang perlu merumuskan strategi terintegrasi dalam menjalankan diplomasi mengingat bahwa tujuan diplomasi haruslah merupakan agenda nasional. Dalam hal ini disarankan agar Indonesia lebih aktif lagi memanfaatkan berbagai fora kerja sama internasional. Jadi sebenarnya sudah muncul kesadaran mengenai pentingnya kita mengubah cara pandang baik dalam hal esensi berdiplomasi itu sendiri maupun terkait dengan fokus kawasannya yakni dengan menerapkan *integrated multilevel diplomacy* (Tobing et.al, 2021).

Adapun dalam hal diplomasi ekonomi, secara teoritik diplomasi ekonomi menyangkut aktivitas-aktivitas yang meliputi negosiasi dan kerja sama secara sukarela melalui regulasi yang tidak mengikat (*soft type regulations*) hingga penciptaan dan penegakan aturan (*enforcement binding rules*), dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, dan penggunaan cara-cara ekonomi untuk meningkatkan stabilitas politik (Okano-Heijmans, 2011, h. 17). Setidaknya ada lima jenis bentuk/alat diplomasi ekonomi yang disodorkan oleh Okano-Heijmans (2011, h.18) yaitu diplomasi komersial (*commercial diplomacy*), diplomasi perdagangan (*trade diplomacy*), diplomasi keuangan (*financial diplomacy*), bujukan (*inducements*)

dan sanksi (*sanction*), yang menghasilkan variasi aktivitas/media yang digunakan (gambar 1).

<i>Commercial diplomacy</i>	<i>Trade diplomacy</i>	<i>Financial diplomacy</i>	<i>Inducements</i>	<i>Sanctions</i>
trade promotion	bilateral: FTAs, EPAs	currency swap agreements	bilateral aid: grants, loans	embargo (exports; state)
investment promotion	multilateral: WTO	Exchange-rate policy	debt relief	boycott (imports; individuals)
business advocacy	(anti-dumping) tariffs	buying/selling of government bonds	humanitarian aid	aid suspension
tourism promotion	export or import licenses	freezing assets	granting access to technology	capital controls
promotion of socially responsible investing	import or export quotas, trade and investment barriers	withholding dues or payments	granting membership of international organization	blacklist

← (un)favourable taxation →

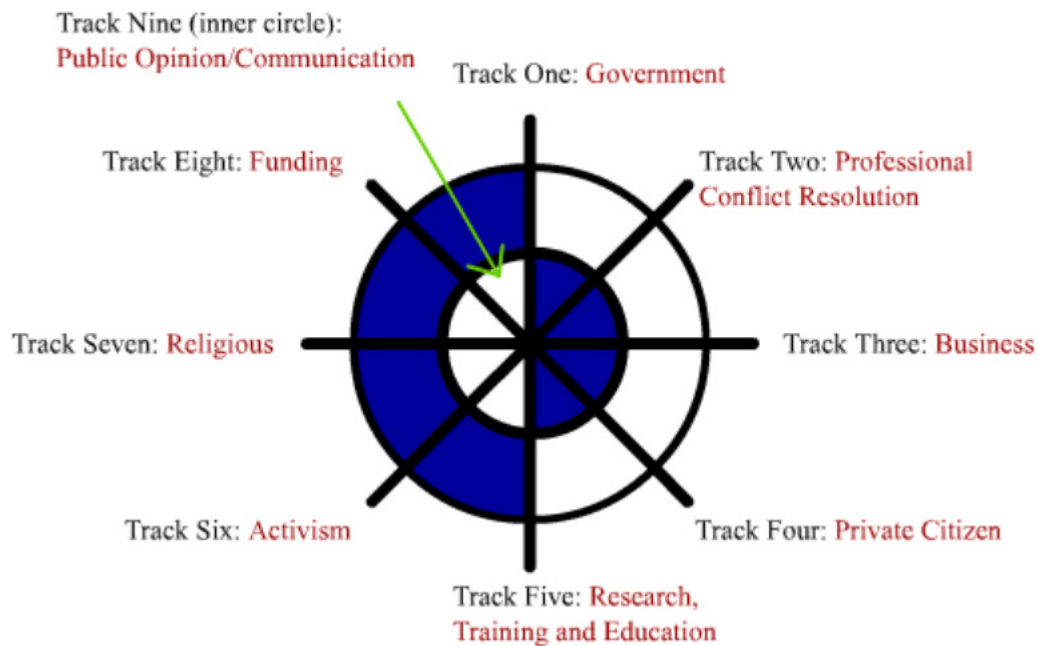
← opening/closing of diplomatic representation →

← summits and high-level visits →

Gambar 1. Alat dan Aktivitas/Media dalam Diplomasi Ekonomi.

Sumber: Okano Heijmans, 2011.

Dalam perkembangan selanjutnya, diplomasi ekonomi dewasa ini makin meningkatkan keterlibatan aktor-aktor non negara. Hal ini sejalan dengan konsepsi *multitrack diplomacy* yang dipopulerkan oleh Diamond & McDonald (1996), yang mengidentifikasi aktor-aktor dan berbagai aktivitas yang berkontribusi kepada proses perdamaian atas konflik dalam suatu komunitas. Pemikiran Diamond & McDonald ini menunjukkan perlunya melibatkan aktor-aktor non negara yang bersinergi dengan aktor resmi negara (*first track diplomacy*) yang lebih efektif dan efisien demi tercapainya kepentingan nasional. Dalam perkembangannya setidaknya ada sembilan jalur yang diidentifikasi memperkuat diplomasi, termasuk diplomasi ekonomi antar negara (lihat gambar 2).



Gambar 2. *The Nine Tracks of Multitrack Diplomacy*

Sumber: Diamond & McDonald, 1996.

Senada dengan pemikiran Diamond dan McDonald (1996), Susan Strange (1992) menyebutkan bahwa aktor non negara khususnya korporasi memiliki peran dalam perkembangan diplomasi ekonomi. Lebih jauh, Strange menekankan pentingnya membangun hubungan yang bersifat kemitraan ataupun aliansi tidak hanya antara pemerintah dan perusahaan (*state-firm diplomacy*) namun juga antar perusahaan itu sendiri (*firm-firm diplomacy*).

Hadirin yang saya hormati,

Dalam kaitan diplomasi ekonomi sebagai bagian dari upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia, penting untuk memotretnya dari sisi upaya Indonesia dalam membuka pasar atau

mitra yang baru. Pada tahun 2014 didanai oleh hibah riset UI, saya bersama rekan-rekan di Departemen Hubungan Internasional pernah melakukan penelitian tentang “Peluang dan Tantangan Indonesia dalam membangun mitra baru di kawasan Amerika Latin khususnya Chile, Meksiko dan Peru”.¹ Kawasan ini sangat menarik diteliti mengingat pertumbuhan ekonominya yang terus mengalami peningkatan yang signifikan. Namun demikian, hubungan kerja sama ekonomi, khususnya perdagangan dengan Indonesia masih sangat rendah.

Beberapa hasil kajian terdahulu melihat bahwa faktor jarak masih menjadi penghambat kerja sama antara Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Latin tersebut. Namun dari hasil kajian yang kami lakukan, ditemukan bahwa jarak seharusnya sudah tidak lagi menjadi penghalang. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, fenomena perkembangan transportasi dan ICT berkontribusi positif dalam mengatasi hambatan jarak. Penelitian ini yang berfokus pada ketiga negara tersebut, menemukan bahwa meningkatkan keterlibatan aktor non negara dan interaksi yang mendalam dengan aktor pemerintah di berbagai level menjadi kunci penting implementasi diplomasi ekonomi Indonesia dalam rangka memperkuat dan memperluas pengaruh dan kerja sama ekonomi Indonesia sebagai upaya mencapai kepentingan nasional.

Dalam hubungan diplomatik Indonesia dengan Chile, Meksiko, dan Peru, firma-firma atau perusahaan-perusahaan Indonesia telah memiliki jalinan kerja sama yang intens dengan perusahaan-perusahaan Chile, Meksiko, dan Peru. Misalnya, perusahaan Indonesia yang sudah bermitra dengan perusahaan Chile melalui Trade Expo Indonesia, yaitu PT. Smart

¹ Hasil riset ini telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku maupun jurnal internasional (Tobing dan Virgianita, 2020; Tobing et.al, 2021). Beberapa bagian dari pidato ini menuangkan kembali hasil pemikiran dalam buku atau artikel jurnal tersebut.

Tbk dengan Jarsa yang bekerjasama dalam bidang CPO, Mayora dengan Jarsa di bidang makanan kering, dan beberapa perusahaan Chile lainnya seperti Hertz, Devet Solution, dan Fexa Internasional. Begitu juga dengan Meksiko yang berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia melalui Mexican Business Council for International Affairs (CEMAI). CEMAI membangun kerja sama dengan KADIN pada 5 September 1991. Kemudian PT. Pertamina dan PEMEX yang bergerak di bidang minyak bumi dan gas (migas) telah bersepakat untuk bermitra. Tidak hanya PT. Pertamina, beberapa perusahaan Indonesia lainnya seperti PGN dan PLN juga menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Meksiko, yaitu TAMMSA, CEMSA, dan Excelerate Energy (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2009, h. 10-11 dalam Tobing et.al., 2021, h. 206).

Diplomasi ekonomi yang dilakukan juga dapat bersifat formal dan informal sesuai dengan kondisi saat itu. Para pengusaha dapat menyelenggarakan pertemuan yang bersifat informal tanpa melalui protokol kenegaraan seperti dalam praktik diplomasi *government-to-government*. Selain itu, para pengusaha yang berperan sebagai *track two* dalam *multitrack diplomacy* dapat berdiplomasi dengan menggunakan *soft power*. Nye (2004) menyatakan, bahwa *soft power* merupakan *the ability to achieve goals through attraction rather than coercion*. Negara dapat memperoleh apa yang diinginkannya tanpa adanya paksaan atau tindakan koersif. Kapabilitas untuk melakukan tindakan persuasif lebih diutamakan dalam *soft power*. Begitu juga dengan aktor non negara seperti pengusaha-pengusaha Indonesia dan ketiga negara Amerika Latin (Chile, Meksiko, dan Peru) tersebut yang dapat mengikatkan diri dalam suatu kerja sama dikarenakan kegiatan bisnis. Setiap pengusaha tidak memiliki unsur keterpaksaan, karena semua yang dilakukan berorientasi pada profit. Hal yang penting adalah masing-masing pihak merasa diuntungkan. Proliferasi kerja sama antara

perusahaan Indonesia dengan perusahaan Chile, Meksiko, dan Peru semakin menambah catatan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh aktor non negara. Hal ini semakin menegaskan, bahwa diplomasi ekonomi dapat diimplementasikan melalui konektivitas antar individu atau dikenal dengan *people to people connectivity* (Tobing et.al., 2021).

Hadirin yang saya hormati,

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa interaksi yang intensif dan aktif antar aktor adalah syarat utama dalam upaya diplomasi ekonomi negara. Namun demikian, perlu dicatat bahwa interaksi yang terbangun seyogyanya dilakukan di berbagai level (*multilevel diplomacy*). Dari temuan penelitian kami, Indonesia, Meksiko, Chile, dan Peru penting untuk memanfaatkan berbagai institusi di mana ketiga negara terlibat seperti Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC).

APEC yang dibentuk pada tahun 1989 merupakan institusi regional yang ditujukan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, kerja sama perdagangan, dan investasi di kawasan Asia Pasifik (Feinberg, 2003). Sejak awal terbentuknya, APEC telah berupaya untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya di seluruh kawasan Asia Pasifik dan menjadi institusi yang patut diperhitungkan bagi negara-negara yang terintegrasi di dalamnya (APEC, 2011). Keterlibatan Indonesia, Chile, Meksiko dan Peru dalam forum APEC dengan keseluruhan anggota berjumlah 21 negara, seyogyanya dapat mengoptimalkan berbagai kerangka kerja sama baik secara bilateral maupun regional.

Sementara itu, FEALAC, adalah *inter regional multilateral forum* yang didirikan tahun 1999 dengan jumlah anggota 36 negara (16 dari

Asia Timur, termasuk Indonesia, dan 20 dari Amerika Latin termasuk Chile, Meksiko dan Peru), merupakan respons atas meningkatnya interdependensi antara dua kawasan. FEALAC menjadi forum yang juga berpotensi untuk menjadi media diplomasi ekonomi Indonesia dalam mengidentifikasi mitra baru yang potensial ataupun mengoptimalkan dialog dan kerja sama yang telah ada. Perlu dicatat perdagangan antara dua kawasan ini terus meningkat dengan rasio perdagangan barang antar anggota FEALAC meningkat dari 22.5% pada tahun 1999 menjadi 33.6% pada tahun 2020 (FEALAC Fact Sheet, 2021).

Dengan keanggotaan Indonesia, Meksiko, Chile, dan Peru di dalam kedua institusi regional seperti APEC dan FEALAC, maka keempat negara tersebut seharusnya dapat memaksimalkan fungsi kedua institusi regional untuk memperkuat kerja sama dagang di antara mereka. Di dalam APEC misalnya, ada sebuah program bernama *Promoting Connectivity* yang merupakan hasil kinerja Indonesia selama menjadi ketua APEC pada tahun 2013 (Kementerian Luar Negeri, t.t.). Program tersebut mengusung peningkatan konektivitas fisik terutama dalam hal infrastruktur dan *people-to-people*, sehingga masyarakat Meksiko, Chile, dan Peru dapat lebih leluasa bepergian ke Indonesia dan begitu juga sebaliknya. Pada akhirnya diharapkan, bahwa mobilitas orang/individu dari dan ke Meksiko, Chile, dan Peru akan semakin tinggi.

Melalui mekanisme kerja sama di dalam APEC dan FEALAC, Indonesia mendapatkan ruang untuk mempelajari karakter kerja sama perdagangan dengan negara-negara Amerika Latin, dalam hal ini khususnya Meksiko, Chile, dan Peru. Ditambah lagi, di dalam FEALAC yang sepenuhnya mengkhususkan kerja sama ekonomi antara Asia Timur dan Amerika Latin, Indonesia dapat memanfaatkan peluang untuk belajar memahami karakter perdagangan dengan Meksiko, Chile, dan Peru. Selain itu, APEC dan FEALAC juga dapat mendorong peningkatan

intensitas perdagangan di antara negara-negara anggota dikarenakan reduksi hambatan tarif dan non-tarif yang selama ini menghambat kerja sama di antara negara anggota (Tobing et.al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa variasi jejaring *intersection* dalam kerja sama perdagangan dapat dilihat sebagai media dalam mengoptimalkan hubungan antar negara tersebut.

Hadirin yang berbahagia,

Berkaca dari upaya memperkuat dan memperluas mitra baru Indonesia di kawasan Amerika Latin, membangun narasi sebagai langkah awal pembentukan *grand strategy* perdagangan Indonesia ke depan menjadi sebuah keniscayaan. Dengan menggunakan strategi diplomasi ekonomi dalam kerangka konsep *multilevel* dan *multitrack*, optimalisasi perdagangan dapat dilakukan dalam kerangka *multilevel* tidak hanya oleh aktor pemerintah, namun juga oleh kelompok bisnis, namun tetap dalam kendali pemerintah sebagaimana budaya ekonomi politik Indonesia selama ini. Hal ini tentu bertujuan untuk tetap menjaga kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat lokal di tengah daya saing global.

Melalui *multitrack diplomacy* berbagai aktor dilibatkan dalam proses perdagangan internasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melibatkan dan memfasilitasi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk membuka relasinya dengan berbagai perusahaan di kawasan dengan potensi mitra baru. *Business to Business* yang terjalin akan mengoptimalkan capaian dalam diplomasi ekonomi Indonesia. Selain itu, dibutuhkan pula diversifikasi aktor komoditas unggul Indonesia yang telah menempati posisi strategis dalam komoditas

ekspor dunia, yakni dengan mendorong pegiat UMKM sebagai manifestasi diplomasi ekonomi Indonesia. Dengan demikian, tidak hanya melakukan perjanjian di antara para elit dalam pertemuan-pertemuan bilateral maupun multilateral, diplomasi ekonomi juga seyogyanya digerakkan dengan konektivitas antar individu. Dengan harmonisasi berbagai aktor tersebut, maka diharapkan upaya ekspansi dan penetrasi pasar bagi produk-produk Indonesia semakin masif, intensif, dan inklusif.

Sebagai catatan terakhir, *grand strategy* diplomasi ekonomi Indonesia, khususnya dalam bidang perdagangan, harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global yang terjadi saat ini dan ke depan.

Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati,

Saya tutup pidato ini dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga saya dapat berdiri di sini.

Dengan ini saya menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak atas dukungan yang diberikan kepada saya selama ini:

- o Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, B.A., MBA, yang telah mengangkat dan menetapkan saya sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang ilmu Hubungan Internasional,

- Dirjen Dikti Kemdikbudristek RI, Bapak Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D., beserta jajarannya yang telah mendukung proses pengusulan dan persetujuan Guru Besar saya,
- Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Bapak Saleh Husin dan sejawat anggota MWA atas motivasi dan kebersamaan yang terus menginspirasi saya,
- Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., khususnya Komite 5 untuk pendampingan, dukungan hingga persetujuannya atas berkas-berkas pengusulan Guru Besar saya ke Ditjen Dikti,
- Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia, Prof. Dr. Nachrowi Djalal dan seluruh anggotanya atas dukungan moril terhadap pengusulan Guru Besar saya,
- Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D., yang telah berkenan memimpin upacara pengukuhan saya sebagai Guru Besar Universitas Indonesia,
- Para Wakil Rektor Universitas Indonesia, khususnya Wakil Rektor I, Prof. Dr. rer. Nat. Abdul Haris, M.Sc., dan Wakil Rektor IV, Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA., beserta jajaran bidang SDM yang telah memberikan pendampingan terus-menerus selama proses pengusulan Guru Besar saya,
- Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof. Dr. Bambang Shergji, M.Sc., beserta segenap anggotanya yang telah memeriksa dan menyetujui pengusulan Guru Besar saya,

- Ketua Senat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof. Dr. Iwan Gardono Sujatmiko, M.A., beserta anggotanya yang terus memberikan dukungan moril atas pengusulan Guru Besar saya,
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, M.Si., Wakil Dekan I, Nurul Isnaeni, S.Sos, M.A., Ph.D., dan Wakil Dekan II, Dr. Jajang Gunawijaya, M.Si., beserta jajaran bidang SDM yang telah bekerja keras membantu proses pengusulan Guru Besar saya,
- Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (2013-2021): Dekan, Dr. Arie Arie S. Soesilo, M.Sc., Wakil Dekan I, Prof. Dody Prayogo, M.PSt., Ph.D., dan Wakil Dekan II, Drs. Awang Ruswandi, M.Si., beserta jajaran khususnya bidang SDM atas segala dukungan dan motivasi yang terus-menerus diberikan untuk saya,
- Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A., yang merupakan pendiri dan sekaligus Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional pertama, semoga Allah SWT memberikan karunia kesehatan kepada Prof. Juwono dalam mengisi masa purna bhaktinya.
- Rekan-rekan kolega yang telah mendahului dan berjuang bersama dalam membesarkan dan mengembangkan Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI: Alm. Bapak Soesiswo Soenarko, M.A., Alm. Drs. I Gde Wisura, M.Si., Alm. Hero U. Kuntjoro-Jakti, M.A., Ph.D., Alm. Prof. Dr. Zainuddin Djafar, M.A., Alm. Drs. Erwin Indradjaja, S.S., M.Si., Almh. Dra. Nurani Chandrawati, M.Si., Alm. Syamsul Hadi, S.Sos., M.A., Ph.D., Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik di sisi-Nya.

- Ketua dan Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Asra Virgianita, S.Sos, M.A., Ph.D., dan Ardhitya Eduard Yeremia Lalisang, S.Sos, M.Sc, Ph.D., yang juga telah bekerja keras dan ikut memantau jalannya proses pengusulan Guru Besar saya,
- Rekan-rekan kolega, di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI yang selalu menjadi teman berdiskusi, bersenda gurau namun tetap berbobot: Dra. Suzie Sudarman, M.A., Drs. Hariyadi Wirawan, M.Soc.Sc., Ph.D., Dr. Dra. Ani Widayani Soetjipto, M.A., Drs. Makmur Keliat, Ph.D., Drs. Edy Prasetyono, MIS, Ph.D., Prof. Dra. Evi Fitriani, MA, MIA, Ph.D., Dra. Nurul Isnaeni, M.A., Ph.D., Dwi Ardhanariswari, S.Sos, M.Phil., M.A., Ph.D, Broto Wardoyo, S.Sos, M.A., Ph.D., Ali Abdullah Wibisono, Ph.D., Yuni Reti Intarti, M.Si., Shofwan Al Banaa Ch, Ph.D, Dr. phil. Yandri Kurniawan, dan Avyanthi Azis, M.S., serta Prof. Dr. Arry Bainus, M.A., dari Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi untuk saya,
- Para dosen muda Departemen Hubungan Internasional FISIP UI yang super brilliant: Rakmat Syarip, S.Sos., M.Sc., Agung Nurwijoyo, S.Sos., M.Sc., Muhammad Arif, S.Sos., M.A., Arivia Tri Dara, S.Sos., M.Si., Aisha Rasyidilla Somantri, S.Sos., M.Sc., Annisa Dian Amalia, S.Sos, M.Sc., Darang Sahdana Chandra, S.Sos., M.A., Raden Maisa Yudono, S.Sos, M.Si, Andrew Mantong, S.Sos, M.Sc., Fitriani, Ph.D., Andreas Pramudianto, S.H., M.Si., Beginda Pakpahan, Ph.D., dan Jona Widagdo Putri, M.A.

- Para staf pendukung (Tendik—Andri Firmansyah, Ayu Pertiwi, Ivan Sanjaya, Riyanto, Sachroni, Rr. Devi, Baharuddin), mahasiswa serta alumni Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dari Program Studi Sarjana maupun Magister, khususnya Sindy Yulia Putri, M.Si., dan Hana Naufanita, S.Sos., yang telah menjadi teman berdiskusi yang produktif, baik dalam kegiatan pengajaran maupun forum diskusi lainnya,
- Para sahabat dan teman diskusi saya: Prof. Dr. Paiman Raharjo, M.M., M.Si. --Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Amris Hassan, M.A., --Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru (2006-2010), Drs. Yuri Octavian Thamrin, M.A. --Duta Besar Indonesia untuk Belgia merangkap Luxemburg dan Uni Eropa (2016-2020), Rudi S. Kamri, aktivis dan pegiat sosial media,
- Rekan-rekan FISIP UI Angkatan 1980, Indra Satya Darmawan dkk, para yunior saya khususnya Ahmad Akbar dan Sagit H. Santoso, Ardian Wicaksono --Kepala Konjen RI di Hamburg, Jerman, Danny Rahdiansyah --Counselor Multilateral KBRI di Nairobi, dan Andi Widjajanto --yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Lemhanas RI yang semuanya yang selama ini telah memberikan support dan dorongan,
- Rekan-rekan komunitas: Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Dr. Alfitra Salamm, APU, dkk, Pengurus Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII), Dr. Asep Kamaluddin Nasir, S.Ag, M.Si., dkk, Gerakan Alumni UI (GA-UI) untuk NKRI, Fajar Soeharto, dkk, Komunitas Pegiat Pelestari Pancasila (KP3), Toto Sugito dkk, dan Alumni UI Garda Pancasila (AUI-GP), Sony Danang, dkk.,

- Keluarga besar saya: ayahanda alm. Tahinature L. Tobing, S.H., dan ibunda almh. Mutiara D. Hutabarat yang telah melahirkan dan mendidik saya dan yang selalu menjadi inspirasi dan semangat, serta mendoakan saya untuk mencapai keberhasilan dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Juga kepada adik-adik/ipar-ipar saya: alm. E.B. Panggabean, S.E./Dra. Frieda MRL. Tobing, Als. Budiarmo Sartono/Dra. Sophia DT br. Tobing, Nimrod Marpaung/Dra. R. Berliana br. Tobing, Samuel H.L. Tobing, SE/Dra. Hely J. br. Pasaribu, alm. Johannes A.L. Tobing, S.H., M.M./Loly br. Sitompul, S.T., Ev. S. Hebron Manalu/ Dewi br. Tobing, S.Pd., dan seluruh keponakan terkasih.
- Kepada perwakilan keluarga besar Tobing: Paman Drs. Tulus L. Tobing, M.M./br. Sinaga, keponakan Irjen Pol. (Pur) Drs. Erwin T.P.L Tobing/Dewi br. Hutabarat, paman Payaman L. Tobing/br. Siregar, paman Timbul L. Tobing/br. Nainggolan, Ir. Mika PL. Tobing/br Tambun, dan keponakan menantu Rudolf Doloksaribu, S.E., M.M./ Emma Chrisdora br Tobing, S.E., yang juga senantiasa memberikan dorongan dan doa kepada saya untuk mencapai gelar akademik tertinggi ini,
- Keluarga besar mertua saya, alm. Bapak H. Mgs. Nungtjik Asaari dan almh. Hj. Msy. Sahida Nurdin, beserta kakak-kakak dan adik ipar saya: H. Mgs. Umar Fuad (Panji) Asaari, Drg. H. Mgs. Usman Fikri Asaari/ Drg. Heryanti Munier, Dra. Hj. Msy. Sofinas Z. Asaari, MPA., H. Mgs. Ubaidillah Faridz Asaari, Alm. Dr. H. Mgs. U. Fatommy Asaari, S.H., M.Si./RA. Dewi Sasetyohati, S.H., H. Mgs. Uzair Fachri Asaari, S.H./ Hj. Mitta Dewi Permatasari, S.H., serta semua keponakan dan cucu tersayang yang selalu memberi dukungan doa untuk saya dan keluarga,

- Keluarga inti saya, isteri tercinta, Dra. Masayu Soraya Zulaicha Asaari, anak-anak saya tersayang Tiara Annisa Zephania Tobing, S.Hum., Raihan Krizia Joshua Tobing, S.I.A., Tamara Aurelia Zamira Tobing, yang menjadi teman debat dalam diskusi yang konstruktif, dan senantiasa menjadi penyejuk jiwa sekaligus penyemangat saya.

Mohon maaf apabila saya tidak dapat menyebutkan satu-persatu guru-guru, rekan-rekan, sahabat, dan kerabat lainnya yang telah berkontribusi dalam perjalanan karir saya dan juga hadir pada upacara pengukuhan saya hari ini.

Semoga Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian selalu damai sejahtera dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Depok, 6 Agustus 2022

Prof. Dr. Drs. Fredy Buhama Lumban Tobing, M.Si

Daftar Kepustakaan

- Acharya, Amitav. 2008. *Asia Rising: Who is Leading?* US: World Scientific Publishing Co Pte Ltd.
- APEC. 2011. *Key APEC Documents 2011: Advancing Free Trade for Asia Pacific Prosperity*.
- Barston, R.P. 1988. *Modern Diplomacy*. UK: Longman.
- Bayne, N & Woolcock, S. 2007. *The New Diplomacy: Decision Making and Negotiation in International Economic Relations*. USA: Ashgate Publishing Company.
- Beach, Derek. 2019. *Introduction: Analyzing Foreign Policy*. US: Springer. 2019.
- Chatterjee, Charles. 2020. *Economic Diplomacy and Foreign Policy-Making*. New York: Palgrave Macmillan.
- Diamond, Louise and Amb. John McDonald. 1996. *Multi-track Diplomacy: A Systems Approach*. 3rd Ed. West Hartford: Kumarian Press.
- Djumala, Darmansjah. (Editor Suhartono). 2021. *Diplomasi Membumi: Narasi Cita Diplomat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- FEALAC Fact Sheet, 2021.
Diakses dari <https://www.fealac.org/new/index.do>.
- Feinberg, R. (Ed.). 2003. *APEC as an Institution: Multilateral Governance in the Asia-Pacific*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- FTA Center Kemendag RI. *Sekilas Tentang FTA*.
Diakses dari <https://ftacenter.kemendag.go.id/sekilas-tentang-fta>.
- Hill, Christopher. *The Changing Politics of Foreign Policy*. 2003. New York: Palgrave Macmillan. 2003
- Hudson, Valerie M and Benjamin S. Day. 2020. *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. 3rd Ed. London, UK: Rowman & Littlefield.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2017, Juni 2). *Bilateral Trade Agreement between Indonesia and its Partners*. Diakses September 22, 2018, diakses dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia: <http://ppid.kemendag.go.id/berkas/informasi/Existing%20dan%20Upcoming%20PTA%20as%20of%2002062017.pdf>

Kementerian Perdagangan. 2017. *Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan*. Jakarta: Kemendag RI.

Leifer, Michael. 1986. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Terjemahan. Jakarta: Gramedia.

Lovell, John P. 1970. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Lumbantobing, Fredy Buhama. 2011. *Dinamika Politik dalam Pembuatan Keputusan Politik Pada Masa Orde Baru: Kasus Bantuan IMF (1997-1998)*. *Disertasi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.

Macridis, Roy. C. 1979. *Foreign Policy in World Politics*. 5th Ed. New Delhi: Prentice Hall of India.

Indonesia telah Kantongi 22 Perjanjian Dagan Bebas. Merdeka Online, 23 Maret 2021. Diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/indonesia-telah-kantongi-22-perjanjian-dagang-bebas.html>.

Okano-Heijmans, M. 2011. Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies. *The Hague Journal of Diplomacy* (6), 7-36.

Rosenau, James N. Ed. 1969. *International Politics and Foreign Policy. A Reader in Research and Theory*. Revised Ed. New York: The Free Press.

Rourke, John T. 2005. *International Politics on the World Stage*. 10th Ed. London: Mc-Graw Hill.

Strange, Susan. 1992. Firms and Diplomacy. *International Affairs*, 68 (1), 1-15.

Suryadinata, Leo. 1996. *Indonesia's Foreign Policy Under Soeharto: Aspiring to International Leadership*. Singapore: Times Academic Press.

Tobing, Fredy B. L dan Asra Virgianita. 2020. Functional multi-track and multilevel economic diplomacy to strengthen trade relations between Indonesia, Chile, and Peru: Conditions for success". *Regions and Cohesion: The Journal of the Consortium for Comparative Research on Regional Integration and Social Cohesion*, 10 (1), 88-107.

Tobing, Fredy B.L, et.al. 2021. *Diplomasi Ekonomi Indonesia di Kawasan Amerika Latin: Merangkul Mitra Baru -Chile, Meksiko, Peru*. Jakarta: UI Publishing.

Weinstein, Franklin B. 1976. *Indonesia Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Soekarno to Soeharto*. Ithaca: Cornell University Press.

Zakaria, Fareed. 2009. *Post-American World and the Rise of the Rest*. USA: Penguin Books Limited.

Riwayat Hidup



1. Data Umum

Nama Lengkap : Fredy Buhama Lumban Tobing
NIP : 196004131989031004
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 13 April 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Protestan

2. Pendidikan

1987 S1-Sarjana, Ilmu Politik/Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia
1998 S2-Magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia
2012 S3-Doktor Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia

3. Riwayat Jabatan Fungsional

1 Maret 1989	Pengajar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
1 September 1993	Asisten Ahli, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
1 Januari 2001	Lektor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
1 April 2004	Lektor Kepala, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
1 Juli 2010	Lektor Kepala, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
1 Juli 2022	Guru Besar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

4. Riwayat Jabatan Struktural

1991 - 1994	Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
2000 - 2004	Ketua Program Sarjana Reguler Dept. Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
2002 - 2006	Ketua Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
2006 - 2008	Sekretaris Program Pascasarjana (Magister) Dept. Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia
2009 - 2013	Dekan FISIP UPN "Veteran" Jakarta

2017 - 2018	Pjs. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
2014 - 2019	Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia
2019 - 2024	Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (Wakil Dosen)

5. Keluarga

Orang Tua	: T. Lumbantobing, SH (Alm) M.D. Hutabarat (Almh)
Istri	: Dra. Masayu Soraya Zulaicha Asaari
Anak	: Tiara Annisa Z. Tobing, S.Hum Raihan Krizia Joshua Tobing, SIA Tamara Aurelia Zamira Tobing

6. Penghargaan

2003	Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun
2013	Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun
2014	Penghargaan Ilmiah Bagi Dosen/Peneliti UI
2015	Anugerah Kekayaan Intelektual UI
2020	Satya Lancana Karya Satya 30 Tahun

7. Publikasi Terbaru

Fredy B.L. Tobing, Agung Nurwijoyo (2021)
“Turkish Islam-Nationalism Under AKP: A New Model For The Muslim World?” Global: Jurnal Politik Internasional Vol. 22 No. 2.
Page 268-286

Annisa D. Amalia, Fredy B.L. Tobing, Riza Iskandar (2020)
“Will ‘Sustainable Development’ Live up to its Promises?: The Paradox of Human-centred Development Strategies.”
IR-UI Commentaries Vol. 1, No. 2, June 2020, ISSN 2722-838X

Fachri Pramuja, Fredy B.L. Tobing (2020)
“Globalisasi dan Pembangunan Infrastruktur Maritim Indonesia di Bidang Konektivitas dan Sistem Logistik (2014–2019)”.
e-Journal of INTERMESTIC: Journal of International Studies (Sinta 2), Volume 5 Number 1.

Fredy B.L. Tobing, Asra Virgianita (2020)
“Functional Multi-track and Multilevel Economic Diplomacy to Strengthen Trade Relations Between Indonesia, Chile, and Peru: Conditions for Success.” Jurnal Internasional bereputasi dan terindex Scopus, Regions and Cohesion (Reco), Volume 10, Issue 1, Spring 2020.

Erlangga Arbi Prakoso, Makmur Keliat, Fredy B.L. Tobing (2019)
“The Internationalization of Renminbi.” INTERMESTIC, Journal of International Studies, Volume 4, Nomor 1 Tahun 2019, e-ISSN:2503-443X.

Fredy B.L. Tobing, Erwin Indradjaja (2019)
“Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) and Its Impact in Indonesia.” Global: Jurnal Politik Internasional Vol 21, No 1 Juni 2019 E-ISSN: 2579-8251.

Fredy B.L. Tobing, Agung Nurwijoyo (2018)
“Synthesis of Islam and Democracy in the Context of Turkish Nationalism in the AKP Turkey Era” The 2nd International Conference on Social and Political Issues (ICSPI) 2018 “Rethinking Nationalism: Looking Back and Looking Forward” Prime Plaza Hotel & Suites Sanur Bali, 29-30 October 2018.

Fredy B.L. Tobing (2018)
Pembicara dalam International Post-Graduate Students Conference, berjudul, **“Disruption Era: The Opportunities and Challenges of Indonesian Economic Diplomacy”**.
Proceedings IPGSC 2018 Depok, 14-15 November 2018, ISBN: 978-623-90907-0-8.

Fredy B.L. Tobing, Asra Virgianita, Avyanthi Azis, R. Maisa Yudono, Rakhmat Syarip (2018)
Menulis Buku Saku **“Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Peran Indonesia.”** UI Publishing. ISBN: 978-602-52564-0-0

Fredy B.L. Tobing (2017)
“Fenomena Negara Islam di Iraq dan Suriah (NIIS); Telaah Hubungan Internasional.” Jurnal Ilmu Politik Volume 22 No. 1 Tahun 2017.

